

COFFEE TRADITION: FROM LIVING ROOM TO GLOBAL CAFÉS AS A DIPLOMATIC BRIDGE FOR REALIZING TOLERANCE AND GLOBAL HARMONY

Suheri

Institut Agama Islam At Taqwa Bondowoso
suheri.lpdp@gmail.com

Abstract: *This research explores the evolution of the coffee-drinking tradition from a private familial practice to a global medium for cross-cultural communication and social facilitation. Positioned as a symbolic bridge for cultural diplomacy, coffee is analyzed not merely as a commodity but as an egalitarian instrument for conflict resolution and trust-building. Adopting a constructivist paradigm with a qualitative approach, the study utilizes participant observation, in-depth interviews with cultural practitioners, and the Miles and Huberman interactive model for data analysis. The findings reveal that coffee serves as a "cultural text" that facilitates persuasive, relational, and problem-solving dialogues across diverse religious and national boundaries. The study offers two significant theoretical contributions: first, the Global Coffee Harmony Theory (GCHT), which frames coffee as a model for informal cultural diplomacy; and second, "Harmony Through Symbolic Communication," which conceptualizes the act of drinking coffee as a preventive and curative tool for fostering global solidarity. Ultimately, the research concludes that coffee-based interactions provide a robust framework for creating tolerance and sustainable social harmony in a globalized society.*

Keywords: coffee, symbolic communication, cultural diplomacy, problem solving, global harmony.

PENDAHULUAN

Dalam konteks sosial budaya kontemporer, fenomena pergeseran nilai dalam interaksi sosial semakin nyata. Perkembangan teknologi komunikasi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, dari tatap muka menjadi virtual. Kondisi ini berdampak pada melemahnya ruang dialog sosial yang bersifat hangat dan humanis. Di banyak tempat, konflik sosial, intoleransi, dan polarisasi identitas justru meningkat meskipun akses informasi semakin luas. Sebagai contoh, konflik horizontal di berbagai daerah Indonesia seperti Ambon dan Papua menunjukkan bagaimana kesalahpahaman antar kelompok dapat berujung pada kekerasan ketika komunikasi sosial terputus.¹ Dalam konteks global, ketegangan antarnegara dan perbedaan ideologis juga kerap menimbulkan

¹ Lihat laporan Komnas HAM, *Evaluasi Konflik Sosial di Indonesia*, 2021



konflik yang berkepanjangan, sebagaimana terjadi pada konflik nuklir Iran-Amerika Serikat yang memerlukan upaya diplomasi nonformal untuk mencairkan hubungan antar pihak.²

Dalam kondisi demikian, tradisi sederhana seperti *ngopi* yang pada dasarnya merupakan ruang sosial informal memiliki potensi besar sebagai media rekonsiliasi dan diplomasi budaya. Warung kopi, kafe, dan ruang ngopi menjadi tempat pertemuan berbagai kelompok sosial, tempat ide-ide lahir, dan dialog damai terbangun secara alami. Tradisi ngopi telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia sejak lama. Awalnya, kopi hanyalah bagian dari keseharian masyarakat di ruang tamu rumah-rumah desa, tempat keluarga berkumpul, berbagi cerita, dan mempererat hubungan sosial. Namun dalam konteks sosial modern, ngopi telah bermetamorfosis menjadi fenomena budaya yang melampaui sekadar aktivitas minum. Ia menjadi simbol komunikasi, refleksi, dan rekonsiliasi sosial. Dari warung sederhana di pelosok desa hingga kafe modern di perkotaan, ngopi memfasilitasi perjumpaan lintas kelas sosial, agama, dan generasi. Dalam suasana yang hangat dan nonformal, kopi menjadi jembatan komunikasi yang menumbuhkan empati dan saling pengertian antarmanusia.³

Dalam pendekatan filsafat ilmu, tradisi ngopi dapat dipahami melalui konsep *Dasein* dan *Dassollen*, sebagaimana dijelaskan oleh filsuf eksistensial Martin Heidegger. *Dasein* berarti “apa adanya”, menggambarkan kenyataan bahwa ngopi merupakan bagian dari kehidupan empiris masyarakat Indonesia, sementara *Dassollen* berarti “seharusnya adanya”, menandakan bahwa tradisi ngopi seharusnya dimaknai lebih dalam dan bukan hanya sebagai aktivitas konsumtif, tetapi sebagai ruang moral untuk membangun dialog kemanusiaan, solidaritas sosial, dan bahkan perdamaian.⁴ Dengan demikian, ngopi mengalami pergeseran makna dari sekadar kebiasaan menuju praksis eksistensial yang bernilai kemanusiaan.

Kopi juga memiliki fungsi sosial yang signifikan dalam membangun komunikasi simbolik dan lintas budaya. Dalam kerangka teori interaksi simbolik yang dikemukakan oleh Herbert Blumer, tindakan sosial manusia selalu diwarnai oleh simbol-simbol yang dimaknai bersama.⁵ Dalam konteks ini, secangkir kopi menjadi simbol kesetaraan dan kedekatan sosial. Ketika dua orang duduk bersama sambil menikmati kopi, batas status sosial, jabatan, dan ideologi seakan lenyap. Kopi mengundang percakapan yang jujur dan terbuka, menjadi wahana membangun *trust* (kepercayaan) antarindividu maupun kelompok. Dalam konteks lintas budaya, William Gudykunst menegaskan bahwa komunikasi informal seperti ini berperan penting dalam menumbuhkan toleransi dan empati antarbangsa.⁶

Fungsi sosial kopi tidak berhenti di tingkat simbolik, melainkan juga konkret dalam penyelesaian konflik sosial. Di Ambon, setelah pecah konflik agama pada tahun 2004-2005, muncul inisiatif warga membuka “Warung Kopi Pela Gandong”, tempat masyarakat lintas agama berkumpul dan berdialog tanpa tekanan formal. Upaya sederhana ini terbukti

² BBC News, *Iran Nuclear Talks: How Coffee Breaks Softened the Tone*, 2022.

³ Heryanto, Ariel. *Budaya Ngopi dan Ruang Publik Indonesia*, Yogyakarta: INSIST Press, 2019.

⁴ Heidegger, Martin. *Being and Time*. Harper & Row, 1962.

⁵ Blumer, Herbert. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. University of California Press, 1969.

⁶ Gudykunst, William. *Bridging Differences: Effective Intergroup Communication*, Sage Publications, 2004.



efektif dalam merajut kembali kepercayaan sosial dan mengurangi ketegangan horizontal.⁷ Demikian pula di Aceh pascakonflik 2005, warung kopi menjadi arena rekonsiliasi antara mantan kombatan GAM dan aparat pemerintah, membentuk ruang keakraban baru yang memperkuat proses perdamaian Helsinki.⁸ Di Papua, beberapa komunitas lokal memanfaatkan forum *ngopi bareng* antar tokoh adat dan gereja untuk mencegah potensi konflik etnis dan memperkuat kohesi sosial.⁹ Bahkan di lingkungan kampus, berbagai perguruan tinggi seperti UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Brawijaya memprakarsai “Dialog Ngopi Kebangsaan” untuk membangun moderasi beragama di kalangan mahasiswa.¹⁰

Fenomena serupa juga terjadi di Pasar Kliwon, Solo, di mana pertemuan antarwarga lintas etnis melalui *warung kopi kebersamaan* berhasil mencairkan ketegangan pascainsiden intoleransi tahun 2019.¹¹ Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa kopi mampu berperan sebagai *social reconciliator*-mediator sosial yang menjembatani perbedaan dan menghidupkan kembali nilai-nilai kemanusiaan.

Secara global, kopi juga memainkan peran penting dalam diplomasi budaya. Indonesia, misalnya, memanfaatkan kopi sebagai instrumen diplomasi publik dalam forum internasional seperti KTT G20 di Bali (2022), di mana kopi Nusantara disajikan sebagai simbol persahabatan dan keramahan bangsa.¹² Di Afrika Timur, ritual minum kopi bersama menjadi simbol rekonsiliasi politik antara Ethiopia dan Eritrea setelah konflik panjang, ketika kedua pemimpin negara itu melakukan prosesi minum kopi bersama sebagai tanda perdamaian.¹³ Di Amerika Selatan, inisiatif “Coffee Diplomacy” antara Brasil dan Amerika Serikat pada 2019 menjadi medium kerja sama ekonomi sekaligus rekonsiliasi pasca perbedaan kebijakan lingkungan.¹⁴ Dalam diplomasi barat, seperti antara Amerika Serikat dan Vietnam, pertemuan informal *coffee meeting* sering dijadikan langkah awal membangun hubungan diplomatik yang lebih cair, bahkan menjadi bagian dari proses normalisasi hubungan setelah perang.¹⁵ Begitu pula dalam lingkup Asia Tenggara, “ASEAN Coffee Dialogue” kerap dijadikan ruang informal bagi para diplomat membicarakan isu ekonomi dan keamanan regional tanpa tekanan politik formal.¹⁶

Dengan demikian, kopi tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai filosofis dan kemanusiaan. Ia menjadi medium yang mempertemukan *rasa* dan *rasio* manusia-mengikat hubungan personal sekaligus membuka cakrawala intelektual. Dalam perspektif komunikasi simbolik, setiap tegukan kopi mengandung makna yang lebih luas: kesetaraan, keakraban, dan kejujuran dalam dialog. Maka, tradisi ngopi dapat dimaknai sebagai bentuk

⁷ Tempo.co, *Warung Kopi Pela Gandong Jadi Simbol Perdamaian Ambon*, 2015

⁸ Kompas, *Kopi dan Rekonsiliasi Aceh Pascaperdamaian Helsinki*, 2017

⁹ Jubi.id, *Ngopi Bareng Tokoh Adat Papua Bangun Damai dari Bawah*, 2020

¹⁰ Detik.com, *Dialog Ngopi Kebangsaan di Kampus untuk Moderasi Beragama*, 2022

¹¹ Solopos.com, *Warung Kopi Kebersamaan Pasar Kliwon dan Upaya Merajut Toleransi*, 2021

¹² CNN Indonesia, *Kopi Nusantara Jadi Simbol Diplomasi di KTT G20 Bali*, 2022

¹³ Reuters, *Coffee Ceremony Marks Ethiopia–Eritrea Peace Process*, 2018.

¹⁴ The Guardian, *Coffee Diplomacy: Brazil–US Partnership Brewed in Cooperation*, 2019.

¹⁵ The Washington Post, *Vietnam–US Coffee Talks and the Road to Reconciliation*, 2020.

¹⁶ ASEAN Secretariat, *ASEAN Coffee Dialogue: Informal Diplomacy in Practice*, 2021.



diplomasi sosial yang menumbuhkan perdamaian dari ruang-ruang kecil, tanpa perlu podium megah.

Dari sudut pandang filsafat ilmu, ngopi adalah praksis reflektif yang merekatkan “ada” dan “seharusnya ada”. Ia memanggil manusia untuk hadir secara autentik, mendengar dengan empati, dan membangun hubungan yang bermakna. Di dunia yang semakin digital dan terfragmentasi, kopi menjadi simbol resistensi terhadap keterasingan modern. Melalui kopi, manusia kembali pada hakikatnya sebagai makhluk sosial yang memerlukan dialog, bukan sekadar interaksi. Maka, secangkir kopi bukan hanya sarana relaksasi, tetapi juga ruang kontemplasi dan rekonsiliasi sosial - sebuah bentuk diplomasi kemanusiaan yang sederhana namun mendalam.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk memahami tradisi ngopi di Kabupaten Bondowoso sebagai praktik sosial dan kultural yang memiliki potensi strategis dalam penyelesaian konflik antara petani kopi, pihak PTPN, aparat pemerintah, serta oligarki lokal. Bondowoso dikenal sebagai salah satu sentra kopi unggulan di Jawa Timur-terutama kopi Arabika Ijen-Raung yang telah menembus pasar ekspor. Namun, di balik kejayaan komoditas ini, terdapat ketegangan sosial yang kerap muncul antara petani

Konflik petani kopi dan PTPN Bondowoso berpusat pada sengketa lahan yang telah berlangsung lama dan memanasi pada Oktober 2025, sedikitnya 6.661 pohon kopi berusia tiga tahun yang tergolong Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dilaporkan ditebang. Aksi pengrusakan di lahan seluas 4,6 hektar tersebut diperkirakan terjadi pada Minggu (12/10/2025) malam. Pengrusakan oleh Orang Tidak Kenal (OTK) kembali mencuat tanggal 5 November 2025 dengan pengrusakan 20.000 pohon kopi milik PTP. Potensi konflik lainnya yaitu korporasi perkebunan negara mengenai akses lahan, harga jual, serta keadilan distribusi hasil. Dalam konteks ini, penelitian berupaya menggali bagaimana kopi, yang menjadi identitas ekonomi dan budaya masyarakat Bondowoso, dapat difungsikan sebagai media diplomasi sosial yang menjembatani kepentingan antara kelompok yang berkonflik. Melalui forum-forum ngopi bareng, dialog informal antarpetani, aparat, dan pihak perusahaan dapat berlangsung secara egaliter tanpa sekat birokrasi maupun hierarki kekuasaan. Tradisi ngopi dengan demikian tidak hanya menjadi ruang simbolik untuk memperkuat solidaritas, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme komunikasi damai yang memungkinkan terciptanya kesepakatan, kompromi, dan rekonsiliasi sosial berbasis kearifan lokal. Dengan mengangkat konteks Bondowoso, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa diplomasi kopi dapat menjadi model penyelesaian konflik agraria yang humanis, partisipatif, dan berakar pada budaya masyarakat setempat.^[7]

METODE PENELITIAN

Paradigma penelitian ini adalah konstruktivis; pendekatan kualitatif dipilih untuk menangkap makna, praksis, dan konstruksi sosial yang melingkupi tradisi ngopi serta peranannya dalam penyelesaian konflik di Bondowoso. Pemilihan informan dilakukan secara purposive (dan dilengkapi snowball sampling ketika diperlukan) untuk memastikan keterwakilan aktor kunci, antara lain petani kopi, perwakilan PTPN, aparat pemerintah daerah, tokoh masyarakat/oligarki lokal, pemilik warung/kafe, serta pelaku budaya ngopi lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif di berbagai lokasi



(ruang tamu, warung kopi desa, kafe perkotaan, dan forum-forum dialog lokal) untuk merekam praktik sosial sehari-hari; wawancara mendalam semi-terstruktur untuk mengeksplorasi perspektif, pengalaman, dan narasi aktor; serta analisis dokumen dan literatur terkait diplomasi budaya, kebijakan agraria, dan arsip media untuk konteks historis dan kebijakan. Untuk menjamin keabsahan data diterapkan triangulasi sumber (berbagai kelompok informan), triangulasi metode (observasi, wawancara, dokumen), dan triangulasi penyelidik (diskusi antarpeleliti dan peer-debriefing). Selain itu dilakukan *member checking* dengan beberapa informan kunci, penyimpanan audit trail, dan pencatatan refleksi peneliti untuk meningkatkan kredibilitas dan keterandalan temuan. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman: (1) reduksi data dilakukan dengan transkripsi rekaman, penyaringan, dan pengkodean awal menuju kategori-tema melalui teknik coding terbuka dan aksial; (2) penyajian data dilakukan dalam bentuk penataan tematik dalam bentuk matriks, tabel, narasi ringkasan, dan peta konseptual yang memfasilitasi identifikasi pola; serta (3) penarikan dan verifikasi kesimpulan, penarikan makna yang bersifat induktif, pengujian melalui pencarian kasus negatif, dan verifikasi silang dengan sumber-dokumen serta umpan balik informan. Seluruh proses mengikuti prosedur etika penelitian: persetujuan informan (*informed consent*), kerahasiaan identitas, dan izin institusional bila diperlukan. Pendekatan ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman yang kaya, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai bagaimana kopi berfungsi sebagai media diplomasi sosial dalam menyelesaikan konflik agraria dan sosial di Bondowoso.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian lapangan di Kabupaten Bondowoso, khususnya di wilayah Kali Gedang dan kawasan Kawah Ijen, mengungkap dinamika sosial yang kompleks antara petani kopi rakyat, pihak PTPN XII, aparat keamanan, serta kelompok oligarki lokal. Konflik yang terjadi berawal dari sengketa lahan dan akses pengelolaan hasil kopi, di mana petani menuntut hak kelola yang lebih adil, sedangkan PTPN mempertahankan klaim hukum atas kawasan tersebut. Peristiwa benturan sosial ini memuncak dalam serangkaian aksi protes, penangkapan, hingga putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman penjara kepada beberapa petani pada tahun-tahun sebelumnya (lihat: *Tempo.co, 2022; Mongabay, 2021*).

Namun demikian, di tengah ketegangan tersebut, muncul fenomena sosial yang menarik - tradisi ngopi sebagai medium rekonsiliasi dan diplomasi sosial. Melalui forum informal “ngopi bareng” yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat, aktivis sosial, dan akademisi lokal, komunikasi yang sebelumnya kaku dan penuh curiga mulai mencair. Kopi menjadi simbol kesetaraan meja perundingan, di mana petani, aparat, dan pihak korporasi dapat duduk bersama tanpa hirarki formal. Proses rekonsiliasi ini melibatkan pertemuan rutin di warung kopi, diskusi budaya di kafe sekitar Ijen, serta dialog terbuka di balai desa Kali Gedang.

Dalam beberapa kasus, pendekatan berbasis *coffee diplomacy* ini berhasil menurunkan eskalasi konflik, membuka jalur komunikasi baru, dan mendorong kesepakatan pengelolaan bersama (*co-management*) antara masyarakat dan pihak PTPN. Bahkan beberapa aparat yang sebelumnya berperan represif kini terlibat aktif dalam



kegiatan sosial budaya bertema kopi, menandai transformasi simbolik dari “konflik agraria” menjadi “ruang dialog sosial.”

Hasil penelitian lapangan pada bulan September, Oktober hingga November 2025 menunjukkan bahwa ketegangan sosial di kawasan Kali Gedang, Ijen, dan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso kembali meningkat akibat sengketa lahan antara kelompok petani kopi rakyat, pihak PTPN XII, serta aparat keamanan dan unsur oligarki lokal. Konflik ini dipicu oleh perluasan area tanam yang diklaim sebagai wilayah kelola PTPN, sementara masyarakat adat dan kelompok tani menganggap kawasan tersebut merupakan tanah warisan turun-temurun yang selama puluhan tahun dikelola secara mandiri.

Peristiwa yang terjadi pada pertengahan Oktober 2025 memperlihatkan eskalasi signifikan. Sejumlah petani melakukan aksi protes di sekitar kawasan Kali Gedang, menuntut keadilan dan hak pengelolaan lahan. Aksi tersebut berujung pada penegangan fisik dengan aparat keamanan yang diturunkan untuk menjaga area perkebunan. Beberapa tokoh masyarakat sempat dipanggil untuk memberikan keterangan, dan proses hukum mulai dijalankan terhadap sejumlah individu yang dianggap melanggar batas administrasi perkebunan. Meskipun tidak separah konflik agraria sebelumnya, insiden ini sempat menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kembali polarisasi sosial antara petani dan pemerintah daerah.

Namun, berbeda dengan periode konflik sebelumnya, pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama unsur Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) segera mengambil langkah-langkah preventif dan rekonsiliatif. Pada akhir Oktober 2025, Bupati Bondowoso menginisiasi pertemuan terbuka di Pendopo Raden Bagus Asra, menghadirkan perwakilan PTPN XII, kelompok tani, tokoh agama, akademisi Universitas Bondowoso, serta unsur TNI–Polri. Pertemuan tersebut dikemas dalam format “Ngopi Bareng Rekonsiliasi”, sebuah forum dialog nonformal yang mengedepankan kearifan lokal dan pendekatan budaya kopi.

Dalam forum tersebut, seluruh pihak duduk sejajar di meja bundar tanpa simbol jabatan formal. Kopi lokal “Ijen Raung” disajikan sebagai simbol kesetaraan dan ketulusan dialog. Melalui suasana yang santai, muncul berbagai kesepakatan awal: antara lain pembentukan Tim Mediasi Bersama yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, perwakilan petani, dan pihak perusahaan; pembukaan akses informasi publik tentang batas lahan; serta komitmen TNI–Polri untuk menempuh pendekatan humanis dalam pengamanan kawasan.

Pada awal November 2025, langkah konkret lanjutan dilakukan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) “Kopi untuk Harmoni”, yang berisi komitmen bersama untuk menjaga ketertiban sosial dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan berbasis kopi. Pemerintah daerah juga melibatkan Dinas Perkebunan dan Dinas Koperasi dalam merancang pola kemitraan baru antara petani rakyat dan perusahaan perkebunan, agar tidak ada lagi dominasi sepihak.

PEMBAHASAN



Untuk mengurai persoalan tersebut maka dari paparan data di atas bisa dipahami dari beberapa teori. Perspektif Teori Interaksionisme Simbolik (Herbert Blumer)¹⁷ Dalam konteks konflik Bondowoso, ngopi berfungsi sebagai simbol sosial baru yang menengahi makna antara kelompok berkonflik. Melalui interaksi simbolik di meja kopi, aktor sosial menegosiasikan kembali identitas, status, dan persepsi lawan mereka. Tindakan sederhana seperti menyeduh kopi bersama menjadi sarana penegasan makna baru: bahwa “persaudaraan lebih kuat dari sengketa”. Proses ini menunjukkan bagaimana simbol (kopi) merekonstruksi realitas sosial secara bersama-sama.

Sedangkan bila ditinjau dari Teori Kolaborasi Konflik (Barbara Gray) Model rekonsiliasi ngopi di Bondowoso memperlihatkan tiga tahapan kolaboratif : problem setting (penyamaan persepsi antaraktor), direction setting (penciptaan kesepakatan nilai dan tujuan bersama), dan implementation (pembentukan forum kerja sama sosial-ekonomi). Melalui media kopi, setiap pihak memiliki ruang aman untuk menyampaikan aspirasi tanpa tekanan struktural. Hal ini membuktikan bahwa kolaborasi efektif dapat lahir dari ruang budaya lokal yang menekankan kesetaraan dan informalitas.¹⁸

Faktor tersebut akan berbeda hasilnya bila dikaji dengan Teori Komunikasi Lintas Budaya (Gudykunst) dari sudut kerangka komunikasi lintas budaya,¹⁹ ngopi menjadi ritual komunikasi adaptif yang mampu menjembatani perbedaan nilai antara aktor negara, korporasi, dan masyarakat adat. Tradisi ngopi di Bondowoso menampilkan uncertainty reduction mechanism-yaitu proses pengurangan prasangka melalui percakapan santai yang berulang. Dengan demikian, kopi berfungsi sebagai mediator budaya yang menumbuhkan mutual understanding di tengah pluralitas sosial.

Namun Teori Psikologi Sosial (Festinger & Tajfel) perspektif psikologi sosial²⁰ melihat bahwa rekonsiliasi kopi di Bondowoso merefleksikan dinamika perubahan disonansi kognitif dan pembentukan identitas sosial baru. Ketika aktor-aktor konflik menyadari bahwa mereka memiliki kesamaan nilai kemanusiaan dan ekonomi melalui kopi, maka identitas kelompok (“kami petani” vs “mereka aparat/PTPN”) mulai luluh menjadi identitas kolektif bersama: “komunitas kopi Bondowoso.” Proses ini memperlihatkan konversi dari konflik identitas menuju sinergi sosial berbasis simbol budaya.

Dari hasil pengamatan dan wawancara mendalam di lapangan, proses rekonsiliasi sosial yang terjadi di Kabupaten Bondowoso menunjukkan adanya pergeseran paradigma penyelesaian konflik, dari pola koersif yang berorientasi pada penegakan kekuasaan menuju pendekatan dialogis dan kolaboratif yang menekankan kesetaraan sosial dan komunikasi simbolik.²¹ Pendekatan baru ini terwujud melalui forum *Ngopi Bareng Rekonsiliasi*, yang menjadi ruang sosial alternatif bagi masyarakat, pemerintah, dan pihak

¹⁷ Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. University of California Press.

¹⁸ Gray, B. (1989). *Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems*. Jossey-Bass.

¹⁹ Gudykunst, W. B. (2004). *Bridging Differences: Effective Intergroup Communication*. Sage Publications

²⁰ Festinger, L. (1957). *A Theory of Cognitive Dissonance*. Stanford University Press.

²¹ Hasil penelitian lapangan penulis di Kabupaten Bondowoso (Oktober–November 2025) serta sintesis teoretis dari kajian filsafat sosial dan komunikasi lintas budaya



perusahaan untuk membangun kesepahaman bersama melalui media budaya lokal yaitu kopi.

Dalam kerangka teori Interaksionisme Simbolik yang dikemukakan oleh Herbert Blumer, setiap tindakan sosial memiliki makna yang dikonstruksi melalui interaksi antarindividu. Forum ngopi menciptakan ruang simbolik baru yang menetralkan relasi kuasa dan membuka ruang kesetaraan eksistensial. Ketika para aktor sosial - mulai dari petani, aparat, hingga pihak PTPN - duduk bersama tanpa simbol formal, kopi berfungsi sebagai medium simbolik yang menandai kesetaraan dan kejujuran dialog. Dalam momen inilah makna konflik dinegosiasikan ulang: dari relasi “lawan” menjadi relasi “mitra dialog” yang saling memahami dan berempati.²²

Selanjutnya, dalam perspektif Teori Kolaborasi Konflik yang dikembangkan oleh Barbara Gray, upaya rekonsiliasi Bondowoso merepresentasikan tiga tahap kolaboratif yang khas: pertama, *problem setting*, yaitu upaya identifikasi bersama akar masalah agraria tanpa tuduhan atau penyalahgunaan kekuasaan; kedua, *direction setting*, berupa perumusan visi kolektif mengenai kesejahteraan dan keadilan ekonomi berbasis kopi; dan ketiga, *implementation*, yakni pembentukan lembaga kolaboratif dan forum komunikasi berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak.²³ Model ini menunjukkan bahwa kolaborasi berbasis budaya lokal memiliki efektivitas tinggi dalam mengatasi konflik agraria yang kompleks.

Dalam konteks lintas nilai dan budaya, teori Komunikasi Lintas Budaya yang dikemukakan oleh William Gudykunst juga menemukan relevansinya.²⁴ Forum lintas institusi ini mempertemukan pihak-pihak dengan latar sosial yang sangat berbeda baik pemerintah, masyarakat adat, korporasi, dan aparat keamanan. Melalui interaksi informal dalam suasana ngopi, mereka belajar mengelola perbedaan nilai, bahasa, dan persepsi melalui proses *uncertainty reduction* dan *anxiety management*. Kopi berfungsi sebagai cultural buffer, yaitu penetral ketegangan budaya antara kekuasaan formal dan masyarakat akar rumput.

Pendekatan lain yang memperkuat temuan ini berasal dari Psikologi Sosial, khususnya teori disonansi kognitif dari Leon Festinger dan teori identitas sosial dari Henri Tajfel.²⁵ Dalam aktivitas ngopi bersama, individu yang sebelumnya mengalami disonansi karena ketegangan atau kecurigaan terhadap pihak lain mulai mengalami reduksi disonansi kognitif. Proses ini memungkinkan terbentuknya identitas sosial baru, di mana masyarakat, aparat, dan pemerintah mulai memandang diri mereka sebagai bagian dari satu komunitas bersama - Bondowoso sebagai tanah kopi dan harmoni.²⁶ Identitas kolektif

²² William B. Gudykunst, *Bridging Differences: Effective Intergroup Communication* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2004).

²³ Leon Festinger, *A Theory of Cognitive Dissonance* (Stanford: Stanford University Press, 1957); Henri Tajfel & John C. Turner, “An Integrative Theory of Intergroup Conflict,” dalam *The Social Psychology of Intergroup Relations* (Monterey: Brooks/Cole, 1979).

²⁴ Hasil penelitian lapangan penulis di Kabupaten Bondowoso (Oktober–November 2025) serta sintesis teoretis dari kajian filsafat sosial dan komunikasi lintas budaya.

²⁵ Leon Festinger, *Teori Disonansi Kognitif* (terj. Djameludin Ancok), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 23–25

²⁶ Henri Tajfel & John C. Turner, *Teori Identitas Sosial: Psikologi Hubungan Antar-Kelompok*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 17–19.



ini memperkuat rasa saling percaya dan memperluas makna rekonsiliasi dari sekadar penyelesaian konflik menuju pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Dari serangkaian proses tersebut, penelitian ini menghasilkan temuan konseptual bahwa kopi bukan hanya komoditas ekonomi, melainkan simbol diplomasi sosial yang mampu mengatasi krisis dan polarisasi masyarakat. Tradisi ngopi membuka ruang komunikasi horizontal yang jarang dijangkau jalur birokratis formal, sekaligus memperkuat nilai-nilai kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran sosial.

Dengan mengintegrasikan data empiris lapangan dan analisis teori sosial, penelitian ini melahirkan konsep baru yang disebut **Global Coffee Harmony Theory (GCHT)** - yaitu *kopi sebagai medium simbolik yang memfasilitasi kolaborasi lintas budaya, menumbuhkan kesetaraan sosial, serta membangun identitas kolektif global yang harmonis*. Kasus Bondowoso menjadi representasi nyata penerapan teori ini dalam konteks lokal, menunjukkan bahwa harmoni sosial tidak selalu lahir dari instrumen hukum atau kekuasaan, tetapi bisa tumbuh dari secangkir kopi yang diseduh bersama - tempat makna, rasa, dan rekonsiliasi berpadu dalam kesunyian yang damai.²⁷

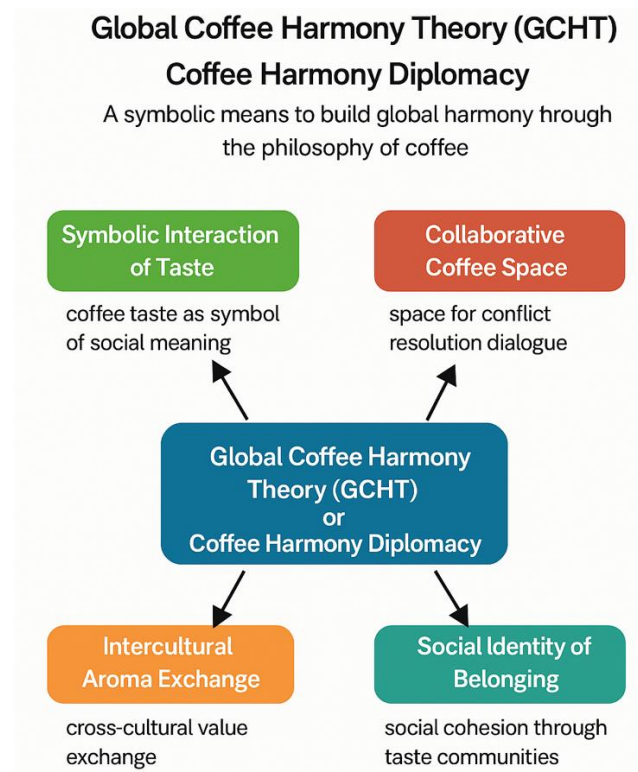
Kopi menjadi simbol universal tentang kesetaraan dan keterbukaan dengan munculnya konsep *symbolic hospitality*, yakni keramahan yang dibangun melalui simbol sederhana namun bermakna dalam membangun rasa saling percaya. Sementara itu, melalui pendekatan **Kolaborasi Konflik** yang diperkenalkan Barbara Gray, forum “Ngopi Bareng Rekonsiliasi” di Bondowoso perlu terus dibangun menjadi sarafana efektivitas dialog nonformal dalam menurunkan ego partisipan dan mengubah konflik menjadi kolaborasi; dari sini lahir konsep *Collaborative Coffee Space*, ruang dialog partisipatif yang berakar pada kesetaraan rasa, serta gagasan *soft diplomacy through coffee* sebagai bentuk diplomasi lunak berbasis budaya minum kopi²⁸. Dalam kerangka **Komunikasi Lintas Budaya** menurut William B. Gudykunst, kopi berfungsi sebagai *cultural buffer* yang menetralkan perbedaan nilai, bahasa, dan latar sosial - melahirkan konsep *Cultural Espresso* yang menandai bagaimana cara manusia menyeduh dan menikmati kopi mencerminkan nilai toleransi dan penghormatan antarbudaya. Perspektif **Psikologi Sosial** dari Leon Festinger dan Henri Tajfel memperkuat pandangan ini dengan menjelaskan bahwa kegiatan ngopi bersama menciptakan *collective identity marker*, yakni penanda identitas sosial baru yang tidak berbasis ras atau kelas, melainkan pengalaman rasa yang dibagikan bersama; dari sinilah lahir teori *Social Cohesion through Shared Taste*, bahwa kohesi sosial tumbuh melalui pengalaman rasa yang sama. Sintesis dari empat kerangka teori tersebut mengarah pada formulasi konseptual baru yang disebut **Global Coffee Harmony Theory (GCHT)** atau **Coffee Harmony Diplomacy**, yaitu teori komunikasi dan sosial yang menjelaskan bagaimana filosofi kopi menjadi sarana simbolik untuk membangun harmoni global melalui empat dimensi utama: *Symbolic Interaction of Taste* (rasa kopi sebagai simbol makna sosial), *Collaborative Coffee Space* (ruang dialog resolusi konflik), *Intercultural Aroma Exchange* (pertukaran nilai antarbudaya), dan *Social Identity*

²⁷ Herbert Blumer, *Interaksionisme Simbolik: Perspektif dan Metode* (terj. M. Dwi Marianto), (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 45–47.

²⁸ Barbara Gray, *Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems* (San Francisco: Jossey-Bass, 1989).



of Belonging (kohesi sosial melalui komunitas rasa). Dalam konteks ini, kopi menjadi ekologi sosial harmoni global arena di mana makna sosial diproduksi, konflik diubah menjadi kolaborasi, budaya saling memahami, dan identitas sosial diperkuat. Maka, kopi tidak hanya menjadi produk ekonomi, tetapi instrumen diplomasi budaya dan medium komunikasi universal yang mempersatukan manusia di atas perbedaan, sebagaimana direfleksikan dalam prinsip *from taste to trust-coffee as the art of harmonious diplomacy*. Temuan dan penjelasan tersebut bisa dilihat dalam kerangka berikut :



Gambar 1.
Temuan Konseptual

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa tradisi ngopi tidak sekadar aktivitas budaya atau kebiasaan sosial, tetapi merupakan ruang komunikasi simbolik yang memiliki kekuatan transformatif dalam membangun *toleransi, rekonsiliasi, dan harmoni sosial*. Melalui observasi lapangan dan wawancara di Kabupaten Bondowoso khususnya pada konteks konflik agraria antara petani, PTPN, aparat, dan oligarki lokal ditemukan bahwa ritual ngopi menjadi potensi besar dan mampu mengubah paradigma penyelesaian konflik dari pendekatan koersif menjadi pendekatan dialogis dan kolaboratif. Tradisi ini menghadirkan ruang netral di mana pihak-pihak yang berkonflik dapat duduk bersama, berbagi cerita, dan menegosiasikan ulang makna konflik dalam suasana kesetaraan rasa dan kemanusiaan.

Dari analisis teoretis, penelitian ini mengintegrasikan empat perspektif besar Interaksionisme Simbolik (Blumer), Kolaborasi Konflik (Gray), Komunikasi Lintas Budaya (Gudykunst), dan Psikologi Sosial (Festinger & Tajfel) yang secara sinergis menjelaskan dimensi sosial, kultural, dan psikologis dari praktik ngopi. Hasil temuan penelitian ini merumuskan sebuah sintesis dari keempat teori ini melahirkan temuan konseptual baru berupa teori *Global Coffee Harmony Theory (GCHT)* atau disebut juga *Coffee Harmony Diplomacy*. Teori ini mendeskripsikan kopi sebagai medium simbolik yang berfungsi dalam empat tataran makna Symbolic Interaction of Taste yang memadukan rasa kopi menjadi simbol kesetaraan dan kedekatan sosial; Collaborative Coffee Space dengan menjadikan ruang dialog untuk resolusi konflik dan pembangunan kepercayaan; Intercultural Aroma Exchange melalui pertukaran nilai dan pengalaman lintas budaya; dan Social Identity of Belonging terbentuknya identitas sosial kolektif melalui pengalaman rasa bersama.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan konsep baru dalam kajian komunikasi sosial dan diplomasi budaya, yakni *Coffee Harmony Diplomacy* suatu bentuk diplomasi lunak (*soft diplomacy*) berbasis budaya kopi yang mengedepankan rasa, ruang, dan relasi sebagai sarana membangun kepercayaan sosial (trust), kolaborasi lintas budaya, dan kohesi kemanusiaan global. Dalam konteks lokal Bondowoso, kopi terbukti menjadi jembatan rekonsiliasi yang efektif; sementara dalam konteks global, ia menawarkan paradigma baru diplomasi berbasis kemanusiaan yang lahir dari akar budaya, bukan kekuasaan. Secara konseptual, *Coffee Harmony Diplomacy* menjadi tawaran teoretis orisinal dalam bidang filsafat ilmu sosial dan komunikasi budaya bahwa dari secangkir kopi, manusia dapat menemukan harmoni, menghapus sekat identitas, serta membangun dunia yang lebih inklusif dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Secretariat, *ASEAN Coffee Dialogue: Informal Diplomacy in Practice*, 2021.
- Barbara Gray, *Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems* (San Francisco: Jossey-Bass, 1989).
- BBC News, *Iran Nuclear Talks: How Coffee Breaks Softened the Tone*, 2022.
- Blumer, Herbert. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. University of California Press, 1969.
- CNN Indonesia, *Kopi Nusantara Jadi Simbol Diplomasi di KTT G20 Bali*, 2022.
- Detik.com, *Dialog Ngopi Kebangsaan di Kampus untuk Moderasi Beragama*, 2022.
- Gudykunst, William. *Bridging Differences: Effective Intergroup Communication*, Sage Publications, 2004.
- Heidegger, Martin. *Being and Time*. Harper & Row, 1962.
- Herbert Blumer, *Symbolic Interactionism: Perspective and Method* (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1969).
- Heryanto, Ariel. *Budaya Ngopi dan Ruang Publik Indonesia*, Yogyakarta: INSIST Press, 2019.



- Jubi.id, *Ngopi Bareng Tokoh Adat Papua Bangun Damai dari Bawah*, 2020.
- Kompas, *Kopi dan Rekonsiliasi Aceh Pascaperdamaian Helsinki*, 2017.
- Leon Festinger, *A Theory of Cognitive Dissonance* (Stanford: Stanford University Press, 1957); Henri Tajfel & John C. Turner, “An Integrative Theory of Intergroup Conflict,” dalam *The Social Psychology of Intergroup Relations* (Monterey: Brooks/Cole, 1979).
- Resume laporan Komnas HAM, *Evaluasi Konflik Sosial di Indonesia*, 2021.
- Reuters, *Coffee Ceremony Marks Ethiopia–Eritrea Peace Process*, 2018.
- Solopos.com, *Warung Kopi Kebersamaan Pasar Kliwon dan Upaya Merajut Toleransi*, 2021.
- Tempo.co, *Warung Kopi Pela Gandong Jadi Simbol Perdamaian Ambon*, 2015.
- The Guardian, *Coffee Diplomacy: Brazil–US Partnership Brewed in Cooperation*, 2019.
- The Washington Post, *Vietnam–US Coffee Talks and the Road to Reconciliation*, 2020.
- William B. Gudykunst, *Bridging Differences: Effective Intergroup Communication* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2004).

